



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 2, Tahun 2023, pp 1-11
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Monografi Desa dan Sustainibilitas Pembangunan: Studi Kasus Pada Desa Swadaya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Februati Trimurni^{1✉}, Sally Marissa Sihombing², M. Imanuddin Kandias Saraan³

Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sumatera Utara^{1,2,3}

Email: februati@usu.ac.id^{1✉}, sallymarisa@usu.ac.id², muhammadimanuddin@usu.ac.id³

Abstrak

Artikel ini mencoba untuk mendeskripsikan eksistensi dan ketersediaan monografi desa dalam kaitannya dengan pembangunan desa berkelanjutan. Monografi desa pada hampir seluruh wilayah di Indonesia belum disusun secara terpadu yang semestinya memuat data-data dasar desa yang akurat, mutakhir dan dapat digunakan sebagai dasar pembangunan desa yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengandalkan wawancara, observasi, diskusi kelompok terarah dan pengumpulan data sekunder sebagai sumber data penelitian. Informan penelitian terdiri dari pemerintah desa, tokoh masyarakat dan penduduk melalui wawancara langsung atau diskusi kelompok terarah. Penelitian ini menemukan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah desa dalam menyusun monografi desa. Monografi desa lazimnya masih disusun oleh pihak luar desa tanpa keterlibatan secara partisipatoris pemerintah maupun unsur masyarakat desa. Disamping itu monografi desa belum disusun secara terintegrasi dalam makna bahwa monografi hanya disusun berdasarkan tujuan sektoral lembaga penyusunnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, studi ini merekomendasikan perlunya upaya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten pada umumnya untuk menyusun monografi desa yang terintegrasi, akurat, dan mutakhir sehingga dapat diandalkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa secara

Kata Kunci: *monografi, data dasar, pemerintah desa, pembangunan berkelanjutan*

Abstract

This article attempts to describe the existence of village monographs and their relation to sustainable village development. Village monograph in almost all regions in Indonesia have not been prepared in an integrated manner which should contain basic village data that is accurate, up-to-date and can be used as a basis for sustainable village development. This study was conducted qualitatively by relying on interviews, observation, focus group discussions and secondary data collection data as research data sources. Research informants consisted of village authorities, community leaders and villagers who were met through direct interviews and through focus group discussions. This study found that so far there has been no serious concern from the village government in compiling basic village data. Village monographs are generally still compiled by village external parties so that there is no participatory touch from the community in compiling the basic data. The village monograph data elements have not been compiled in an integrated manner in the sense that the village monograph is compiled based on the sectoral-objectives of the compiling institution. In the context of sustainable village development, this study recommends the need for local government and village government efforts to compile basic village data that is integrated, accurate and up-to-date so that it can be used as a basis for policy making and sustainable village development.

Keywords: *monograph, basic data, village government, sustainable development*

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan desa di Indonesia bagaimanapun harus menjadi prioritas dan perhatian khusus pemerintah karena beberapa alasan. Pertama, karena mayoritas penduduk di Indonesia pada faktanya tinggal di pedesaan. Kedua, karena sektor ekonomi dan kontribusi ekonomi pedesaan merupakan penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional. Ketiga, masyarakat desa merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak kebijakan nasional khususnya kebijakan ekonomi, politik, dan pembangunan. Melihat posisi desa yang krusial dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya harus mampu membuat grand design pembangunan desa mulai dari level regulasi, perencanaan kebijakan, penganggaran dan perencanaan program.

Dari berbagai langkah yang diperlukan dalam membangun desa sebagaimana diuraikan di atas, sebagian besar telah dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Pada tataran regulasi, pemerintah telah membuat peraturan khusus mengenai desa yang sebelumnya masih diatur dalam peraturan perundang-undangan bersamaan dengan pengaturan tentang pemerintah daerah (UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, pengaturan mengenai desa dan pemerintahannya desa telah diatur dalam peraturan khusus yang sekaligus mengisyaratkan bahwa perhatian pemerintah nasional terkait desa sudah lebih riil dari periode-periode sebelumnya.

Dalam konteks perencanaan kebijakan terkait desa selanjutnya, sejumlah peraturan dan petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa telah disusun oleh pemerintah pusat. Hadirnya konsep Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan bukti nyata bagaimana pemerintah pusat sangat memperhatikan pentingnya perencanaan pembangunan desa. Bukan hanya pada konteks pembangunan an sich melainkan juga mempersyaratkan aktualisasi perencanaan partisipatif (participatory planning) yaitu bagaimana pemerintah desa dan semua elemen yang ada di dalamnya secara bersama-sama mengenali potensi dan permasalahan desa secara mandiri dan selanjutnya merencanakan secara bersama pembangunan desa yang benar-benar sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Perhatian lainnya pemerintah pusat terhadap pembangunan desa ini adalah komitmen pemberian dana untuk pemerintahan dan pembangunan desa. Komitmen tersebut diaktualisasikan dengan pengalokasian dana desa dalam berbagai skema yang cukup besar jika dibandingkan dengan dana yang diperoleh desa pada periode-periode sebelumnya. Tercatat sejak tahun 2020 alokasi dana desa untuk setiap desa rata-rata mencapai Rp. 1 miliar. Disamping itu, berbagai kementerian teknis telah melakukan program pembangunan di desa baik dalam rangka pembangunan fisik seperti infrastruktur maupun pembangunan non fisik seperti program ekonomi, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan. Tak terkecuali para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor nasional dan asing, banyak mencanangkan program-program yang ditujukan untuk membangun desa. Pada kondisi ini, dapat dikatakan bahwa peluncuran program pembangunan desa telah menjadi "horse-rod" dalam satu dekade terakhir

Namun berbagai kebijakan, pengalokasian anggaran yang besar serta beragam program pembangunan yang diluncurkan untuk desa belum sepenuhnya tepat sasaran atau berdampak signifikan sebagai "pemicu" pengembangan dan pembangunan desa. Ada berbagai alasan yang terdeteksi mengapa program-program tersebut tidak tepat sasaran atau berdampak signifikan terhadap pengembangan dan pembangunan desa. Alasan tersebut antara lain kurangnya program pendampingan bagi desa, kurangnya pengawasan terhadap kebijakan atau program yang diluncurkan, kurangnya keterlibatan masyarakat desa secara partisipatif, bias dalam memahami konsep pembangunan partisipatif dan yang tidak kalah penting adalah kurangnya diperlukan database desa atau tidak adanya data dasar desa yang benar-benar valid, akurat dan terkini yang dapat dijadikan landasan utama dalam membangun dan mengembangkan desa. Database tersebut dalam artikel ini selanjutnya disebut sebagai monografi desa.

Berdasarkan uraian di atas artikel ini selanjutnya merumuskan permasalahan kajian yaitu bagaimana ketersediaan monografi desa dan pemanfaatannya untuk perencanaan pembangunan desa berkelanjutan. Artikel ini selanjutnya mengusung 4 (empat) pertanyaan pokok, yaitu (1) apakah monografi desa yang diteliti sudah tersedia, (2) seperti apa data dasar desa yang selama ini dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan desa, (3) apa saja kendala yang dihadapi desa dalam menyusun monografi desa dan (4) apa saja kendala desa dalam memanfaatkan monografi

desa untuk perencanaan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Perspektif Teori Dan Metode Kajian

Monografi secara umum dimaknai sebagai rincian data dan statistik pemerintahan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan dan kondisi geografis dari suatu wilayah dengan monografi dapat di ketahui gambaran suatu wilayah. Monografi terdapat pada organisasi pemerintahan di tingkat negara, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa (Fahmi Ardi, 2010). Pada tataran empiriknya, monografi desa ini dapat ditampilkan dalam profil desa. Profil desa dan kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan. Profil desa dan kelurahan harus dapat berfungsi sebagai sumber informasi potensi desa dan kelurahan. Oleh karena itu, data profil haruslah tersedia, lengkap dan akuntabel. Ketersediaan, kelengkapan dan akuntabilitas data merupakan indikator evaluasi terhadap kualitas data profil (Achsini et.al, 2015). Lebih lanjut, Putra dan Parwata (2013) menambahkan bahwa ketersediaan data yang lengkap, benar adanya dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan suatu elemen penting dalam perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Profil desa dan kelurahan diperlukan untuk mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral seperti dinyatakan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

Dalam kerangka desentralisasi dan pelaksanaan otonomi desa, kehadiran monografi desa sangat penting dalam mengaktualisasikan otonomi desa tersebut. Secara etimologis otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani "autos" yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri (Armansyah, 2016). Otonomi daerah merupakan pengejawantahan kemandirian daerah yang disertai dengan kemampuan ekonomi untuk dapat mendanai secara mandiri proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Pratchett, 2001). Dengan program desentralisasi, daerah otonom tersebut seharusnya mendapatkan angin segar untuk menginisiasi kreatifitas daerah yang selama ini berada dalam belenggu sentralisasi (Ervannudin & Widodo, 2016). Kreatifitas daerah termasuk desa seharusnya dapat menciptakan pemerintahan lokal yang demokratis, menciptakan atau memperkuat saluran dan mekanisme partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi dalam prosedur publik dan memegang pejabat yang bertanggung jawab (Kaufmann et.al dalam Hidayat (2017).

Pada bahagian lain, desentralisasi dibedakan atas model desentralisasi administratif atau dekonsentrasi dan desentralisasi politik atau devolusi (Smith, 1985). Sarjana seperti Cheema dan Rondinelli (1983) membuat kategorisasi yang lebih komplit tentang ragam model desentralisasi yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi dan privatisasi. Desentralisasi baik pada pola dan model dekonsentrasi maupun devolusi menjadi trend global pasca perang dunia ke-2 dimana hampir semua negara berusaha mengaplikasikannya. Pilihan itu pada intinya tidak terlepas dari fakta bahwa desentralisasi dapat mengantarkan negara atau daerah meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kekuasaan, pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik (Rondinelli et al., 1984; Mawhood, 1983; Tiebout, 1956; Sujarwoto; 2017). Pada tataran lebih lanjut, desentralisasi tersebut dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas, demokrasi, partisipasi, transparansi dan ekonomi pada daerah otonom (Burki et.al, 1999; Oates, 1972; Mills, 1990).

Desa sebagai sebuah entitas merupakan replika dari sebuah negara atau paling tidak merupakan tiruan dari daerah otonom seperti provinsi, kabupaten maupun kota. Secara teoritik otonomi desa itu bukan pemberian pemerintah yang secara hirarkis lebih tinggi melainkan telah ada sejak desa terbentuk yang dapat saja dilandaskan pada adat-istiadat setempat (Kushandaji, 2015). Otonomi desa sebagai konsep lanjutan dari otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik dan penguatan demokrasi yang selanjutnya diharapkan memberi ruang bagi warga negara agar memiliki kemampuan dalam menyumbangkan kreatifitasnya (Ramadana, 2013).

Dalam sistem ketatanegaraan, derajat otonomi desa beririsan dengan kewenangan pemerintahan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini bermakna bahwa terdapat objek kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang eksistensinya dalam wilayah geografis desa sehingga objek tersebut bisa saja menjadi kewenangan pemerintahan yang lebih tinggi tersebut sehingga desa tidak memiliki kewenangan terhadapnya. Oleh karenanya, pemberlakuan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi keniscayaan.

Pada perkembangan selanjutnya pelaksanaan desentralisasi dibatasi oleh kewenangan devolutif atau kewenangan hakiki sebuah daerah otonom tanpa boleh diintervensi oleh elemen pemerintahan yang lebih tinggi (Keuffer, 2016). Hal ini bersesuaian dengan pernyataan McDonnell (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi maupun perkembangan masyarakat tidaklah didasari atas dorongan dari pemerintah pusat melainkan hasil dari pelaksanaan desentralisasi dimana warga lokal berperan banyak di dalamnya. Untuk melaksanakan otonomi desa secara ideal, pemerintah desa harus memiliki kemampuan finansial sehingga mereka kuat, dapat berkembang, mandiri, demokratis sehingga menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang adil dan masyarakat yang sejahtera (Maolani, 2019). Salah satu bentuk real dan legal dalam meningkatkan kemampuan finansial pemerintah desa adalah melalui peningkatan PADes.

Pada konteks mengimplementasikan otonomi desa, konsep pembangunan berkelanjutan menjadi pilihan penting dan menjadi keharusan dewasa ini. Pembangunan desa secara berkelanjutan secara global ditandai dengan kemunculan inisiatif Johannesburg tahun 2002 (Aziz et al, 2010). Konsep ini menjadi populer setelah dikumandangkan oleh Komisi Brundtland di bawah pimpinan Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak Oktober 1984 sampai dengan Maret 1987 dan melahirkan buku "Our Common Future" yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development (WECD) pada tahun 1987 (Hadad, 2010). Inisiatif Johannesburg menyetujui implementasi nilai-nilai keberlanjutan dalam pembangunan yang berkelanjutan yaitu menggabungkan 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan yaitu kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya (Aziz et al, 2010).

Pemberian konsep dari pembangunan yang berkelanjutan berawal dari sistem berpikir, definisi pembangunan yang berkelanjutan pada ilustrasi ini mewajibkan bahwa keterkaitan antara ruang dan waktu. Keiner (2001) menguraikan definisi pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen memastikan kondisi hidup yang bermartabat berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan dan mempertahankan jangkauan atau alternatif akses yang luas dalam merencanakan pola hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial (Mohan Munasinghe dalam Rogers, et. al (2008) yakni memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan capital, menjaga dan mempertahankan sistem fisik dan biologis serta menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.

Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif atau yang bertujuan untuk membangun pandangan secara rinci yang dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit serta tidak menggunakan tahapan analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya (Moleong, 2012). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen. Wawancara tersebut direkam melalui alat perekam pada perangkat smart phone dan dipindahkan dalam database penelitian. Wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pertanyaan umum yang kemudian didetailkan dan dikembangkan ketika melakukan wawancara atau setelah melakukan wawancara untuk melakukan wawancara berikutnya (Afrizal, 2014). Untuk memperkaya data penelitian, dilakukan observasi terbatas atau menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan (Bungin, 2007). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menilai secara langsung pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik di Kantah Kota Medan. Studi dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara (Sugiono, 2016).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2012). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman yaitu melakukan pengumpulan data untuk selanjutnya dilakukan reduksi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesiapan Desa Bakaran Batu Merealisasikan Otonomi Desa

Desa Bakaran Batu merupakan salah satu desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki 3 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 2.672 jiwa (BPS, 2020). Berdasarkan data resmi statistika, pekerjaan mayoritas

penduduknya adalah sekalipun wilayah ini berada pada area yang sangat dekat dengan wilayah perkotaan seperti Medan dan kawasan perdagangan Percut Sei Tuan dan Batang Kuis. Desa ini, jika dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Batang Kuis, merupakan desa dengan penduduk terkecil kedua setelah desa Mesjid. Infrastruktur wilayah dapat dikatakan sudah bagus sekalipun status ekonomi penduduknya dikategorikan menengah ke bawah. Jika dilihat dari kondisi ekonomi, ketersediaan infrastruktur serta kondisi sosial budaya masyarakatnya, desa ini dikategorikan sebagai desa swadaya.

Sesuai dengan regulasi nasional tentang desa, Bakaran Batu merupakan sebuah daerah otonom yang secara filosofis merupakan sebuah entitas sekaligus replika dari sebuah negara atau paling tidak merupakan tiruan dari daerah otonom seperti provinsi, kabupaten maupun kota. Otonomi desa tersebut merupakan hak istimewa desa yang pada hakikatnya bukan merupakan pemberian pemerintah pada hirarki yang lebih tinggi melainkan telah ada sejak desa terbentuk yang dapat saja dilandaskan pada adat-istiadat setempat (Kushandaji, 2015). Otonomi desa sebagai konsep lanjutan dari otonomi daerah merupakan bagian dari sistem politik dan penguatan demokrasi yang selanjutnya diharapkan memberi ruang bagi warga negara agar memiliki kemampuan dalam menyumbangkan kreatifitasnya (Ramadana, 2013).

Indikator	Keterangan/Jumlah	Indikator	Keterangan/Jumlah
Letak Geografis	3°65' LU 9° 869'BT	Jumlah Fasilitas Kesehatan	4 Unit
Luas Wilayah	0,45 m ²	Jumlah Tempat Ibadah	2 Unit
Tinggi wilayah DPL	0-30 m	Jumlah Industri	1 Unit
Jarak Ke Ibukota Kecamatan	1 km	Jumlah Tenaga Kerja Industri	300 Orang
Jumlah Dusun	3	Jumlah Pasar Pekan	1 Lokasi
Jumlah Perangkat Desa	9	Jumlah Toko dan Warung	42 Unit
Klasifikasi Perkembangan Desa	Berkembang	Jumlah Bengkel dan Servis Elektronik	8 Unit
Jumlah Penduduk	6.149 Jiwa	Jumlah Tenaga Kerja Pada Bengkel dan Servis Elektronik	18 Orang
Jumlah SD, SLTP dan SLTA	1 Unit	Realisasi PBB	68.698.737

Tabel 1 : Data Dasar Desa Bakaran Batu

Sumber: BPS, Kecamatan Batangkuis Dalam Angka 2022

Desa Bakaran Batu secara historis merupakan desa agraris dimana sektor kehidupan, mata pencaharian dan sumber penghasilan utama warganya bergantung pada sektor pertanian (Wawancara, 2022). Namun seiring perkembangan wilayah desa ini sudah menjadi bagian dari daerah urban atau perkotaan sehingga dalam manajemen pemerintahan, desa ini sudah layak dijadikan sebagai kelurahan. Okupasi warga yang secara tradisional bergantung pada sektor pertanian, kini telah berubah ke sektor industri, perdagangan, pekerjaan formal dan wiraswasta. Namun demikian sektor okupasi masyarakat desa tersebut belum dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan desa yang berasal dari komponen pajak maupun retribusi desa. Di samping itu, desa Bakaran Batu sampai saat ini belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa yang selanjutnya diperuntukkan bagi belanja dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Bakaran Batu berdasarkan tipologi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikategorikan sebagai desa swakarya dan desa berkembang. Desa swakarya dikelompokkan manakala Tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan seterusnya berada pada rentang 60% sampai 80% dari skor maksimal tingkat perkembangan setiap 5 tahun (Permendagri Nomor 12 Tahun 2007). Sedangkan desa berkembang dikelompokkan manakala memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Peraturan Mendes PDTT Nomor 22 Tahun 2016). Realitas ini menunjukkan bahwa desa ini belum sepenuhnya mampu untuk melaksanakan otonomi desa secara ideal dimana semestinya telah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara

berkelanjutan.

Monografi Desa Bakaran Batu: Nihilnya Data Dasar Desa Yang Terintegrasi

Desa Bakaran Batu pada dasarnya telah memiliki Monografi Desa yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Namun demikian monografi desa tersebut belum tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu sehingga belum dapat diandalkan sebagai basis data dalam penyelenggaraan otonomi desa maupun perencanaan pembangunan desa. Pada sisi lain, tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa semakin kompleks sehingga diperlukan profesionalitas dan kerja sama antar elemen, baik dalam internal pemerintahan sendiri maupun masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah termasuk masalah ketersediaan monografi desa tersebut (Mulya, 2016). Data yang termuat dalam monografi desa yang ada semestinya merupakan data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (Hastuti, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan disampaikan bahwa pencacahan data desa sebenarnya telah sering dilakukan oleh pihak luar desa khususnya oleh pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten. Di antara pencacahan data tersebut yang luas dikenal dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) maupun sebelumnya melalui Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Pedesaan) (Wawancara, 2022). Program ini belum termasuk program sektoral yang antara lain dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun demikian data hasil pencacahan tersebut tidak diberikan secara khusus ke desa yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh desa untuk tujuan-tujuan perencanaan.

Program pencacahan monografi desa tersebut pada faktanya juga belum dilakukan secara kompherensif dan teritegrasi. Hal ini antara lain karena karena pengolahan data monografi desa belum efektif karena belum adanya program pendukung pengolahan data (Ma'sum & Ajistama, 2020). Monografi desa yang disusun selama ini juga masih dilakukan secara konvensional sehingga berpotensi menjadikan data yang dikumpulkan tidak valid dan akurat. Masalah itu terjadi karena tidak adanya proses pemutakhiran data sehingga data yang tersedia masih terbatas dan cenderung lawas (Harjanti, 2020). Data yang ada selama ini juga disusun secara konvensional sehingga menjadi polemik karena tidak valid dan akurat dan berpotensi membuat program pembangunan desa tidak terarah dan terukur (Devi, 2021). Terakhir, kompetensi aparatur pemerintahan desa yang rendah dalam melakukan pengumpulan data untuk kebutuhan penyusunan monografi desa.

Pada dasarnya, sistem informasi monografi desa merupakan salah satu administrasi desa yang seharusnya bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat disamping informasi tersebut seharusnya dimutakhirkan (Ma'sum & Ajistama, 2020). Pada konteks masyarakat global yang dinamis disertai dengan penggunaan teknologi yang massif, ketersediaan monografi maupun profil desa tersebut sedapatnya juga dapat diakses publik secara luas dengan menyajikannya dalam versi cetak maupun elektronik (Devi & Hidayati, 2020). Ketersediaan monografi tersebut bermakna penting dalam menunjang pembangunan desa sehingga mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan desa dan harapannya program-program pembangunan yang dibuat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran (<https://www.masterplandes.com/artikel/pentingnya-profil-desa/>). Pada tataran empirisnya, monografi desa tersebut dijadikan sebagai data dasar dalam membuat profil desa. Pendayagunaan data profil desa dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristik potensi sumber daya, perkembangan segala sektor pembangunan, serta permasalahan pembangunan di setiap desa dan kelurahan, menjadi pedoman dalam penentuan arah pengembangan desa dan kelurahan sesuai dengan tipologi potensi dan perkembangan masyarakat (Budiman, 2016).

Potensi dan Tantangan Penyusunan Monografi Desa Untuk Perencanaan Pembangunan

Profil desa atau informasi yang berisi potensi dari kelurahan atau desa selama ini hanya dideskripsikan melalui data monografi desa. Hal ini dirasakan memiliki keterbatasan antara lain karena profil desa yang disajikan dalam monograf kemudian disimpan dalam kantor desa membatasi masyarakat untuk mengaksesnya (Zuhriyatib dan Hanif, 2022). Hal ini berbenturan paling tidak dengan transparansi sesuai dengan konsep good governance yang memberikan akses yang luas bagi warga untuk memperolehnya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa monografi desa yang dimiliki oleh Desa Bakaran Batu masih sangat sederhana dan belum disusun secara kompherensif dalam makna mencakup multi sektor aspek pemerintahan, ekonomi, sosial-budaya dan politik di desa.

Monografi desa tersebut pada muaranya belum dapat diandalkan sebagai basis data dalam pelaksanaan otonomi desa serta perencanaan pembangunan desa tersebut. Namun demikian, potensi untuk menyusun data monografi desa yang lengkap, kompherensif dan mutakhir tetap ada paling tidak berdasarkan uraian berikut ini.

Pertama, adanya struktur pemerintahan desa yang cukup lengkap mulai dari level dusun sampai tingkat pemerintahan desa. Pada konteks ini, pencacahan data dalam penyusunan monografi dapat dilakukan secara hirarkis. Kepala dusun dapat membentuk tim pencacahan data monografi yang bertugas untuk mengumpulkan data pada wilayah masing-masing. Bersama dengan anggota tim yang berasal dari dusun yang sama dipastikan mereka lebih mudah menjangkau warga, lebih paham tentang teknik mendapatkan data yang akurat dari warga dusun serta lebih paham dengan sosio-kultural dan kondisi masyarakatnya. Unsur pemerintahan lainnya khususnya pada level yang lebih tinggi dapat bertindak sebagai koordinator, supervisor atau pengarah dalam melakukan pencacahan data yang dilakukan pada tingkat dusun.

Problema kedua terletak pada metode pengambilan dan penyusunan data. Sebagian besar kegiatan pengumpulan data dilakukan secara sepihak oleh lembaga yang memerlukan data dimana tidak menekankan perlunya unsur partisipatoris dalam penyusunan data tersebut. Proses klarifikasi dan konfirmasi terhadap data yang diperoleh jarang sekali dilakukan sehingga data-data tersebut sulit dipastikan validasinya. Bahkan pada banyak kasus adanya kecenderungan bahwa pengambil data dan juga otoritas desa selalu menyesuaikan tampilan data dengan sajian data yang sifatnya administratif dan formalitas. Pada kasus ini, sebagai contoh, warga yang secara nyata sudah bermukim lebih dari 5 (lima) tahun di luar desa, tetap dimasukkan sebagai warga atau penduduk desa (Wawancara, 2022). Hal seperti ini menjadi kendala manakala orang yang benar-benar sudah tidak bermukim di desa tetap dimasukkan sebagai data dasar dalam pembangunan desa. Ke depan, hal seperti ini semestinya tidak terjadi lagi sehingga program pembangunan dan pengembangan desa seperti peluncuran program pengentasan kemiskinan tepat sasaran.

Problema ketiga terletak pada aspek kompetensi dan komitmen pemerintah desa atau warga desa dalam penyusunan data dasar desa. Pada tahap awal disadari bahwa inventarisasi elemen data desa yang diperlukan berikut atribut dan kategorinya bukanlah hal yang mudah. Aparatur desa ataupun warga lainnya mesti mendapatkan pelatihan khusus dalam penyusunan monografi desa tersebut. Pada konteks ini, pemerintah desa dapat menginisiasi perlunya keterlibatan warga yang aktif di dunia pendidikan atau lembaga penelitian untuk meningkatkan kompetensi sebagian aparatur maupun warga desa dalam penyusunan data dasar desa. Kepala Dusun juga selama ini sulit mendapat data dari masyarakat karena keengganan untuk melakukan pendataan kepada masyarakat karena adanya image dari masyarakat kalau ada pendataan selalu dikaitkan akan mendapat bantuan (Asrori dan Supratiawan, 2014). Solusi yang dapat dilakukan dengan menggandeng universitas atau lembaga-lembaga penelitian dalam melakukan pelatihan penyusunan monografi desa tersebut. Terkait dengan komitmen, desa Bakaran Batu sejauh ini belum memiliki inisiatif untuk menyusun data dasar desa masing-masing padahal penyusunan data dasar desa tidak memerlukan standard kompetensi yang tinggi selayaknya penelitian ilmiah yang dikenal pada setiap disiplin ilmu. Untuk melakukan pencacahan data, warga yang sudah menamatkan pendidikan menengah dengan pelatihan singkat dan sederhana semestinya sudah mampu melakukan pencacahan data tersebut. Warga dengan pendidikan tinggi atau aparatur desa lainnya dapat diposisikan sebagai pihak yang melakukan tabulasi, editing dan melakukan analisa data. Desa dengan anggaran yang sudah mandiri semestinya dapat mengalokasikan sebagian anggaran tahunannya untuk melakukan pencacahan dan pemutakhiran data desa.

Problema terakhir berkaitan dengan pemutakhiran data dasar desa. Bahagian ini menjadi masalah paling krusial dalam rangka penyusunan data dasar desa serta kaitan antara data data dasar desa tersebut dengan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan desa. Melakukan pencacahan data desa setiap tahunnya dari titik nol tentunya bukan pekerjaan yang bijak, efektif dan efisien melainkan diperlukan sedikit usaha untuk memastikan data setiap periode tertentu baik per triwulan, semester atau tahunan. Pada konteks penggunaan teknologi informasi dan ragam perangkat lunak teknologi komputer semestinya pekerjaan seperti ini dapat dilakukan dengan melakukan pemutakhiran pada setiap elemen data dasar yang sudah ada. Ragam perangkat lunak yang dapat menyimpan, memproses dan memutakhirkan data sangat banyak ditemukan. Pemerintah desa hanya perlu memastikan ada aparatur atau warga desa yang secara sukarela atau secara profesional melakukan pemutakhiran data dasar tersebut.

Disamping potensi yang besar tersebut, penyusunan monografi desa di Bakaran Batu bukan tanpa tantangan. Tantangan tersebut berhubungan dengan komitmen pemerintah desa, partisipasi

masyarakat dan pemutakhiran monografi tersebut. Terkait dengan komitmen tersebut, pemerintah desa masih dihadapkan pada permasalahan concern dalam melaksanakan pembangunan termasuk kaitannya dengan penganggaran kegiatan. Idealnya, monografi desa atau profil desa menjadi langkah awal dalam melakukan perencanaan pembangunan. Akan tetapi pada saat yang sama pemerintah desa lebih tertarik untuk melakukan pembangunan fisik atau kegiatan yang langsung secara kasat mata dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakatnya. Pada konteks ini, banyak unsur pemerintah desa yang menganggap bahwa kegiatan penyusunan monografi desa bukan merupakan aktifitas yang sifatnya mendesak dan khawatir untuk menggunakan dana desa untuk kegiatan semacam itu (Wawancara, 2022).

Hambatan selanjutnya adalah partisipasi masyarakat yang secara sukarela memberikan tenaga dan pemikiran dalam penyusunan monografi desa tersebut. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi dan kompleksitas sosial-budaya dan ekonomi warga desa, secara tidak sadar partisipasi warga dalam program pembangunan desa perlahan dan berangsur-angsur menurun (Wawancara, 2022). Gotong royong sebagai budaya luhur yang secara tradisional telah berakar dalam budaya masyarakat desa juga mulai hilang digantikan dengan sikap individualisme dan pragmatisme ekonomi (Wawancara, 2022). Realitas ini juga dialami oleh desa Bakaran Batu dimana sudah sangat rendah kepedulian warganya untuk melakukan kegiatan desa yang partisipatif dan sukarela. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah desa untuk menumbuhkan kembali budaya partisipatif melalui konsep gotong royong tersebut. Informan dari kalangan masyarakat justru menyatakan bahwa bukan budaya partisipatif tersebut sebenarnya yang hilang melainkan tidak adanya pembangunan riil dan program yang nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh warga (Wawancara, 2022).

Hambatan terakhir berkaitan dengan pemutakhiran monografi desa tersebut. Pemutakhiran monografi desa dalam kerangka perencanaan pembangunan merupakan sebuah keniscayaan. Data dasar desa yang menjadi substansi dari monografi desa tersebut sangat dinamis yang kerap berubah bukan hanya dalam hitungan semester atau triwulan. Data demografis misalnya, dapat berubah dalam hitungan minggu atau bahkan hitungan hari. Oleh karena pemutakhiran monografi tersebut merupakan keniscayaan. Guna memastikan data tersebut sifatnya akurat dan mutakhir diperlukan kegiatan atau perencanaan pemutakhiran data tersebut secara berkala. Dengan bantuan teknologi informasi yang mudah diakses saat ini, pemutakhiran data ini dapat terwujud. Namun sekali lagi, diperlukan komitmen pemerintah dalam pengalokasian anggaran dan komitmen warganya untuk secara partisipatif terlibat dalam program pemutakhiran data tersebut.

Arah Kebijakan Nasional Terkait Monografi Desa: Peluncuran Big Data Monografi Desa

Pentingnya monografi desa dalam proses perencanaan pembangunan mengharuskan pemerintah desa harus berusaha untuk menyediakan data terkait karakteristik spesifik desanya. Hal itu dapat diwujudkan dalam bentuk profil desa. Profil desa berguna menggambarkan potensi dan tingkat perkembangan desa yang akurat dan komprehensif yang meliputi informasi tentang kondisi desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang ada di desa. Penyusunan profil desa merupakan proses untuk menemukan dan menggali potensi desa yang nantinya dapat dikembangkan melalui program-program pemberdayaan. Dalam pengembangan desa, profil desa sangat penting untuk menunjang pembangunan desa yaitu sebagai data dasar yang dibutuhkan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Profil desa digunakan sebagai pedoman dalam proses perencanaan pembangunan desa dalam bentuk pembangunan fisik dan program peningkatan kapasitas penduduk desa. Ketersediaan data yang diwujudkan dalam profil desa akan mempermudah dalam proses perencanaan pembangunan desa dan harapannya program-program pembangunan yang dibuat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam konteks perkembangan teknologi global yang dinamis yang terus berubah, kecanggihan teknologi dan hadirnya internet telah memberikan kemudahan dalam menyusun data dasar desa seperti monografi desa ini. Pada kasus Indonesia, internet telah menjangkau mayoritas desa dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Populasi penduduk Indonesia saat ini mencapai 280 juta orang dan lebih dari 50 persen telah terhubung jaringan internet sejak tahun 2017 dan menempatkan Indonesia pada urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brasil (Novaria, 2018). Pada konteks ini, arah kebijakan nasional terkait dengan penyediaan monografi desa ini adalah penyediaan big data monografi desa nasional. Big data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan

perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemroses data lainnya (Muryanto, 2017). Karakteristik utama big data ini yaitu volume, velocity dan variety. Volume terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar, velocity berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Sedangkan variety merujuk pada keragaman dan kompleksitas yang ada. Big data menjadi isu yang berkembang saat ini hal itu diimbangi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi mendorong manusia untuk terus memproduksi data baik itu data personal maupun data institusi ataupun Negara termasuk data dasar desa seperti disampaikan sebelumnya.

Pekerjaan selanjutnya adalah pemutakhiran data yang dilakukan dalam kerangka big data tersebut. Pada konteks ini pemerintahan nasional dapat membuat regulasi nasional terkait dengan penyajian dan perlindungan data dan membuat portal khusus untuk melakukan updating data tersebut. Pemerintah daerah membuat regulasi teknis lanjutan terkait pemutakhiran data serta pembuatan program berikut alokasi anggaran untuk melaksanakan pemutakhiran data tersebut. Pemerintah desa selanjutnya menjadi pelaksana langsung pelaksanaan updating atau memperbaharui data profil desanya masing-masing melalui program big data tersebut. Arah kebijakan menuju ketersediaan big data tersebut sudah ada antara lain ditandai dengan terbitnya Permendes 21/2020 dimana regulasi ini berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dimana data dasar desa sangat penting dalam program ini (<https://news.detik.com/berita/d-6632242/kemendes-pdtt-bicara-pentingnya-kekayaan-data-desa-untuk-pembangunan>). Hal yang tertinggal adalah kebijakan nasional yang lebih tinggi dan mengikat dan komitmen pemerintah melebihi apa yang sudah diatur dalam Permendes tersebut.

SIMPULAN

Dari beragam problema yang berkaitan dengan penyusunan monografi desa, kajian ini memberikan beberapa rekomendasi sehingga monografi desa tersedia, mutakhir dan dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pengembangan desa secara berkelanjutan. Pertama, peningkatan kompetensi warga desa dalam penyusunan monografi desa beserta metode pemutakhiran data desa tersebut. Untuk itu diperlukan program peningkatan kapasitas aparatur dan warga desa antara lain melalui program pelatihan penyusunan monografi desa yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi, pemerintah daerah/nasional dan lembaga lainnya. Program itu ditargetkan dapat mengasah kemampuan dan keterampilan pemerintah desa dan masyarakat dalam teknis pencacahan data dasar desa seperti perancangan kuisioner, pedoman wawancara, pedoman observasi serta pengumpulan data sekunder. Selanjutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu membuat program capacity building bagi aparatur pemerintahan desa tentang makna ketersediaan monografi desa serta relevansinya pada konteks pembangunan desa secara berkelanjutan. Pemahaman tersebut selanjutnya diharapkan menumbuhkembangkan concern dan komitmen mereka dalam penyusunan monografi desa tersebut. Concern dan komitmen pemerintah desa tersebut sedapatnya diaktualisasikan dengan pengalokasian anggaran khusus untuk penyusunan dan pemutakhiran desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pada bahagian akhir, kebijakan nasional yang penting dalam rangka menyediakan monografi desa ini adalah program big data nasional monografi desa. Kebijakan itu didukung oleh penyediaan regulasi, program pendampingan dan anggaran penyediaan big data tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R (2013). *Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adriyana, L dan Darumoyo, K (2017), *Big Data Dan Pemanfaatannya Dalam Berbagai Sektor Budi Maryanto, Acarya Pustaka 7 (2): 2442- 4366*
- Agustino, Leo (2008) *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Armansyah, Yudi (2016), *Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan Dikaji dari Kesejahteraan Masyarakat, Journal of Islamic Education Management, El-Idare, Vol. 2 (1): 141- 160.*
- Asrori dan Supratiawan, A (2014) *Kemampuan Perangkat Desa Dalam Menyusun Profil Potensi Desa, Jurnal Bina Praja, 6 (4) 283-291.*
- Awin M dan Novaria, R (2018), *Pemanfaatan Big Data Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi Digital, Majalah Ilmiah BIJAK 15 (2) 127-137.*
- Bardhan, Pranab (2002). *Decentralization of Governance and Development. Journal of Economic Perspective. Vol 16 (4): 185-205.*

- Bungin, Burhan (ed) (2012) Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burki, S. J., Perry, G., & Dillinger, W. R. (1999). Beyond the Center: Decentralizing the State. Washington DC: World Bank, 75.
- Creswel, John W. (2015) Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bintoro.
- Damayanti E., Soeaidy MS., Ribawanto H. (2014), Strategi Capacity Building Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Kampong Ekowisata Berbasis Masyarakat Lokal, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2 (3): 464-470.
- Dewi ASK (2014), Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development*, 5 (1): 1-14.
- Dwiyanto, Agus (2006) Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ervannudin, Nur & Widodo, Bimo Wahyu (2016) Desentralisasi Pendidikan dan Peran aktif Masyarakat Menuju Pendidikan Berkualitas, *Jurnal Penelitian*, Vol. 10 (1): 147-172.
- Fatem A (2011). Policies in Village Development: Learning from Community Empowerment and Participation in Jayapura, *International Journal of Administrative Science & Organization Bisnis & Birokrasi*, 18 (2): 108-121.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
- Badan Pusat Statistika (BPS) (2020), Kecamatan Batang Kuis Dalam Angka, Lubuk Pakam: Badan Pusat Statistika.
- Budiman, Edy (2016), " E-Government Data Profil dan Monografi Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, *JTRISTE*, 3 (1): 49-58.
- Devi, Laksmi Yustika (2021), "Membanding Monografi Desa Konvensional Dengan Monografi Desa Presisi (Kasus: Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor), *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 05 (05): 715-741.
- Devi, Laksmi Yustika & Hidayati, Wahyu (2020), "Pembuatan Profil Desa Gerbosari" *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat*, 3 (2): 445-454.
- Harjanti, Intan Muning (2020), "Penyusunan Profil Desa Sebagai Upaya Pembaharuan Data Di Desa Pengkol, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen", *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 01 (03): 211-214.
- Hastuti, Sri Handriana Dewi (2020), Pentingnya Pemanfaatan Data Kependudukan Di Era Digital Sri, *Jurnal TEKNIMEDIA*, 1 (1): 18-21.
- Master Plan Desa (2021), "Pentingnya Profil Desa" dalam <https://www.masterplandes.com/artikel/pentingnya-profil-des/> diakses tanggal 10 Maret 2021 Pukul 14.00 WIB.
- Ma'sum & Ajistama, Suefi (2020), "Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi Monografi Desa Berbasis Web Pada Pemerintahan Desa Sukadalem", *Jurnal of Innovation and Future Technology (IFTECH)*, 2 (2): 17-30.
- Muhammad Eko Atmojoa, ME, Zuhriyatib E, Hanif, NA, Peningkatan Kualitas Pemerintah Desa Melalui Penyusunan Profil Desa Trimulyo, *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (3) 134-142.
- Achsin, S. N., Cangara, H. dan Unde, A. A. (2015). Profil Desa dan Kelurahan sebagai Sumber Informasi: Studi Evaluasi tentang Penyediaan Informasi Potensi Desa dan Kelurahan di Sulawesi Selatan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan. <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>
- Putra, P. G. K. Wdan Parwata, I. G. N. (2013). Pelaksanaan Program Data Profil Desa dan Kelurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Desa Dauh Puri Angin, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar). *Kertha Negara* Vol. 01, No. 06, September 2013.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa.
- Fu, Qianhong (2004). Trust, Social Capital, And Organizational Effectiveness. Master Of Public And International Affairs faculty Of The Virginia Polytechnic Institute And State University.
- Gunawan, Jamil, Desentralisasi, Globalisasi, Dan Demokrasi Lokal, Jakarta ,LP3ES, 2005 ICSU, ISSC (2015): Review Of The Sustainable Development Goals: The Science Perspective. Paris: International Council For Science (ICSU).
- Kadarisman, Y. 2015. Peran Modal Sosial (Social Capital) Dalam Aktivitas Ekonomi Pedagang Di Desa Guntung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Seminar Nasional Politik, Birokrasi Dan Perubahan Sosial KeII "Pilkada Serentak, Untung Rugi Dan Korupsi Politik" Pekanbaru, 17- 18 November 2015 Rotenberg.
- Robert dan Donough. Gary Mc.1993. The Cultural Meanings of Urban Space. Newyork. Greenwood

- Publishing. Supono, B. 2011. Peranan Modal Sosial Dalam Implementasi Manajemen dan Bisnis. Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Vol. 11, No. 1, April 2011 .
- Azis, Iwan Jaya et.al (2020), Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010.
- Suparmoko, Muhammad (2020), Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional, Jurnal Ekonomika dan Manajemen Vol. 9 (1): 39-50.
- Moleong, L.J. (2012), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Afrizal (2014), Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam berbagai Disiplin Ilmu, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan (2007), Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.